

MEMAHAMI HAKIKAT KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF MENGHINDARI KONFLIK

Fuadi

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry
Jl. T. Nyak Arief No. 128, Asrama Haji Banda Aceh
Email: fuadi@yahoo.go.id

ABSTRACT

The substance of social life is a man ability to understand that life is to become other people in togetherness based on the universal value of religion by dialogic-theology approach. Developing creative thought concept on social would reduce tension and subjective claim on truths. Developing productive economic system will cover any social conflict from indigent and economically oppressed community.

Kata Kunci : Agama, Relasional, Kedamaian

A. Pendahuluan

Persoalan agama merupakan hal yang sangat mendasar terhadap kehidupan manusia, karena agama mengandung unsur keyakinan di dalam diri manusia tentang hal yang gaib sebagai kebenaran yang hakiki atau mutlak. Agama sebagai unsur keyakinan telah memberikan suatu bentuk kehidupan bahwa dengan beragama manusia dapat eksis sebagai makhluk yang berbudi dan berintelektual mulia. Oleh karena itu dengan beragama manusia dapat hidup di dalam masyarakat secara harmonis dan dinamis.

Berbeda dengan sains dan filsafat, agama menekankan keterlibatan pribadi. Walaupun disepakati bahwa tidak ada definisi agama yang dapat diterima secara universal, namun semua orang sependapat bahwa sejarah manusia telah menunjukkan rasa “suci” dan agama termasuk dalam kategori “hal yang suci” tersebut. Kemajuan spiritual manusia diukur dengan tingginya nilai yang diberikan kepada zat yang ia sembah. Seorang yang religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sumber yang tertinggi bagi kepribadian dan kebaikan.

Agama sebagai unsur keyakinan akan menjadi bermakna apabila manusia hidup di dalam ruang lingkup sosial. Kehidupan tidak hanya bersifat individualis, tetapi lebih berimplikasi sosial yang secara filsafat dapat mengubah realitas sosial menjadi lebih manusiawi. Namun demikian, secara defakto di dalam kehidupan yang serba kompleks dengan perkembangan teknologi tinggi telah berdampak pada kecacatan nilai sosial yang kadangkala telah terstruktur dan terpola secara akademis dan ideal. Bahkan, agama telah menjadi alat legitimasi sekelompok orang yang menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik.

Lebih lanjut, berbagai persoalan sosial kemasyarakatan juga memerlukan adanya kritis-filosofis, sehingga nilai-nilai agama dapat berfungsi secara simultan seiring dengan sistem sosial yang ada. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengungkapkan persoalan-persoalan kehidupan sosial keagamaan secara filosofis dengan menggunakan pendekatan analisis-dialektis yang didukung oleh sumber-sumber primer dan sekunder, yang nantinya dapat dijadikan landasan teoritis dan konseptual.

B. Substansi Kehidupan Sosial

Manusia merupakan makhluk otonom dan sekaligus sebagai makhluk sosial, sebagai subjek otonom manusia adalah makhluk yang mandiri, sanggup mengembangkan dorongan kodratnya untuk menuju kearah kesempurnaan. Sebagai individu dengan segala kemandirian dan kebebasannya, manusia menjadi subjek pendukung dan pengamal nilai-nilai religius, rasional, etis dan estetis.¹ Oleh karena itu disamping manusia memiliki nilai otonom, manusia tidak akan sempurna jikalau ia tidak berhubungan dengan sesuatu yang lain.

Manusia pada hakekatnya berusaha mewujudkan dirinya dan untuk menemukan diri dilakukan dalam ketergantungan dengan orang lain. Setiap manusia dalam melakukan realisasi diri berusaha menemukan jati dirinya sebagai orang yang beriman. Realisasi diri tidak pernah berakhir, artinya setiap manusia selalu dapat meningkatkan iman dan taqwanya, baik dilakukan dengan mendayagunakan kesatuan fisik maupun psikis sebagai energi penggerak yang dimiliki manusia atas perintah Allah.

Pada kenyataannya manusia menemukan diri sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, realisasi makna hidup eksistensi pribadi hanya akan berhasil sejauh dimungkinkan oleh orang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsuf Martin Buber dengan Ichu-Du (I-thou), artinya di dalam bahasa Indonesia dapat juga dikatakan “aku Engkau”. “Aku” tidak pernah tanpa relasi dan “aku” tidak pernah merupakan suatu “aku” yang terisolir.²

Hubungan antara “aku” dengan “aku lain” atau “aku” dengan “Engkau”, memungkinkan manusia untuk saling bertemu dalam taraf yang sama, dalam taraf sebagai saudara. Pertemuan dari sesama manusia yang sederajat dan setaraf itu terjadi dalam ruang dan waktu tertentu yang disebut masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial.

Struktur manusia itu dalam segala tindakannya selalu membutuhkan sesama. Manusia itu pada dasarnya tidak hanya “koeksistensi”, melainkan jua “kooperasi”, dengan saling memajukan dan saling mengembangkan harkat dan martabatnya. Korelasi ini harus pula mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hidup di antara dunia materi dan rohani, antara dunia imanen dan transenden, dan antara hak dan kewajiban.³ Koeksistensi dan kooperasi adalah dua unsur yang esensial untuk mengkristalisasikan nilai-nilai sosialitas manusia.

Hidup berdampingan atau koeksistensi dan kerjasama atau kooperasi manusia menjadi nampak jelas dalam bernegara, dimana pembagian tugas dan

¹ Koentowibisono, *Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Suatu Pemahaman Secara Filsafat*, Jurnal Filsafat seri 12 November, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1990. 28

² Bertens K., *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I. Gramedia, Jakarta, 1983, 163

³ Koentowibisono, *Penjabaran Hak-Hak...*, 28

kerjasama menjadi unsur mutlak dalam mengejar suatu tujuan bersama. Negara memperjuangkan kepentingan warganya dan warganya berpartisipasi aktif di dalamnya, sehingga kepentingan dan cita-cita perseorangan maupun bersama dapat terwujud. Apa yang menjadi cita-cita dan kepentingan warga menjadi cita-cita dan kepentingan negara, inilah yang dikatakan Jean Jacques Rousseau dengan “social contract”.⁴

1. Interaksi – Institusional

Hubungan antara individu dan masyarakat atau kelompok tidak dapat dielakkan. Hubungan individu dengan kelompok masyarakat saling mempengaruhi dan saling mengisi. Oleh karena itu interaksi institusional sangat diperlukan. Interaksi masyarakat atau interaksi timbal balik yang aktual sudah mengendap atau membeku dalam pikiran serta tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Interaksi tersebut sudah merupakan suatu interaksi yang sudah di institusionalisasikan.

Institusionalisasi merupakan suatu proses “objektivitas” tingkah laku manusia. Artinya tingkah laku tersebut diwujudkan dalam suatu pola tingkah yang bersifat kurang lebih normatif. Pola itu memberikan suatu bentuk yang tetap ataupun permanent pada tingkah laku anggota-anggota masyarakat tersebut.⁵

Institusionalisasi yang merupakan suatu proses situ adalah suatu proses historis. Artinya, pola tingkah laku yang tertentu merupakan hasil interaksi para “pendahulu” dalam sejarah. Anggota masyarakat berakar pada pendahulu. Anggota masyarakat juga mengingatkan para “penerus” akan pola tingkah laku para pendahulunya. Mereka perlu dan harus menginternalisasikan pola tingkah laku para pendahulunya.

Namun institusionalisasi juga menimbulkan “tekanan sosial”. Artinya, pola tingkah laku para anggota masyarakat harus sesuai dengan pola tingkah laku sosial. Dengan demikian, institusionalisasi merupakan suatu sistem kontrol yang mengawasi tingkah laku para anggotanya.

2. Kebebasan Sosial

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran individu terhadap masyarakat dan institusi kemasyarakatannya berlangsung secara aktif. Namun demikian betapa intensif pun kadar keterlibatan itu, pribadi-pribadi dapat mengubah arti dan tujuan serta dapat membatalkan persetujuan dengan anggota masyarakat dan sebagainya. Hal tersebut sebagai arti metafisis person, pribadi itu berkaitan dengan kebebasan. Paham kebebasan itu mengandung tiga arti yang berbeda-beda, tetapi ketiga arti itu tidak dipisahkan satu sama lain.

- a. kebebasan sebagai cita-cita kesempurnaan eksistensial untuk menatap kemungkinan-kemungkinan baru untuk masa depan dengan membebaskan berbagai halangan untuk mewujudkan dirinya.
- b. kebebasan psikologis, yakni kemauan untuk memilih bertindak atau tidak, kemampuan untuk berpikir, menilai dan menghendaki sesuatu.

⁴ Beck, R.N., *Perspektivesin Social Philosophy*, New York, Renhart and Winston Inc. 1967, hal 149-150

⁵ Alek Lanur, *Dimensi Sosial Dalam, (Manusia dalam Pijar-pijar kekayaan Dimensinya)*. (educational)Mudji Sutrisno, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal 41

- c. Kebebasan kemasyarakatan, bentuk-bentuk kebebasan ini, menjamin keikutsetaan para anggota dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya sebagai subjek. Tetapi perlu adanya syarat-syarat objektif agar mereka dapat bertindak sebagai subjek politik dan sebagainya. Kebebasan ini juga disebut hak-hak demokratis.⁶

Bentuk-bentuk kebebasan di atas saling berhubungan menurut kerangka logis dan eksistensial. Kebebasan asasi merupakan tujuan serta cita-cita yang tertinggi. Kebebasan psikologis merupakan jalan subjektif menuju tujuan tersebut. Kebebasan kemasyarakatan merupakan syarat-syarat hidup objektif. Meskipun kebebasan melekat pada diri manusia, namun kebebasan itu ada batasnya pada kebebasan sesama. Jadi penggunaan kebebasan kita tidak boleh sampai membatasi kebebasan orang lain. Dengan kata lain, kebebasan kita harus diimbangi oleh perhatian kita terhadap hak dan kebutuhan orang lain.⁷

Dari interaksi horizontal yang telah disebutkan di atas, manusia akan sampai pada interaksi vertikal. Artinya para anggota masyarakat tidak hanya berkomunikasi satu sama lain, mereka juga berkomunikasi dalam tahap cita-cita dan nilai-nilai bersama untuk menjaga kesejahteraan bersama sebagai tujuan, artinya pemeliharaan, pembangunan serta perwujudan kepribadian. Kemudian kesejahteraan sebagai ketertiban masyarakat artinya hukum-hukum, peraturan-peraturan, tata tertib adalah bagian dari kesejahteraan bersama.

3. Relasi Dunia – Infrahuman dan Ketuhanan

Untuk memperkuat makna kehidupan sesama tersebut akan lebih berarti apabila manusia berhubungan dengan dunia infrahuman, karena alam dunia adalah bagian dari hidup manusia. Manusia mengalami atau berada ditengah alam dunia serta membangun dan mengembangkan kehidupannya dengan mengolah sumber kekayaan alam untuk kepentingan hidup sosialnya. Oleh karena itu pembinaan suatu makna keharmonisan yang rasional antara manusia dengan alam merupakan tanggung jawab manusia.

Alam memang untuk manusia, tetapi tidak boleh dikuras habis-habisan tanpa tanggung jawab rasional terhadapnya, karena hal ini bisa mendatangkan disharmonis berupa kekurangan sumber daya alam dan kehancuran hidup manusia. Pelestarian dan kelestarian alam harus dijaga dan perlu dibina keharmonisannya antara manusia dan alam.

Kenyataan bahwa manusia mempunyai martabat lebih tinggi dari barang material. Jika manfaatnya demi perkembangan dan kesempurnaan masyarakat, maka manusia telah meninggikan derajat barang-barang lain, sehingga seakan-akan benda duniawi ikut dirohanikan. Teknologi, ekonomi, organisasi, kebudayaan merupakan puncak-puncak keluhuran yang diberikan oleh roh kepada benda-benda duniawi atau material.⁸

Dalam agama dianjurkan kepada umatnya untuk mengolah alam dan hasilnya dapat dimanfaatkan dan selebihnya digunakan untuk kepentingan sosial. Oleh karena itu di dalam agama benda-benda material dapat diangkat kepada nilai spiritual keilahian. Hubungan dengan benda duniawi mengingatkan kembali akan

⁶ Alek Lanur., 44 .

⁷ Magnus – Suseno, F., *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta, 1992, 220

⁸ Driyakara, N., *Percikan Filsafat*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1981, 10-11

kondisi manusia sebagai ada di alam dunia, karena itu hubungan yang bersifat berstruktur itu akan dapat membedakan manusia dari isolasi subjektifitas.⁹

Manusia pada dasarnya memiliki roh. Dimensi roh ini menjadikan manusia terbuka terhadap yang mutlak dan yang tak terbatas, kemampuan melampaui keterbatasan-keterbatasan fisik, wawasan, cakrawala yang luas. Manusia terbuka terhadap yang mutlak karena manusia menyadari bahwa dirinya terbatas dari tiada menjadi ada dan kemudian menjadi ada lagi. Melalui pengalaman yang logis manusia sampai kepada yang mutlak.

Renungan manusia sebagai pribadi manusia mampu berdiri sendiri, namun tidak berdiri dari dirinya sendiri, artinya manusia tidak sempurna, dan tidak pernah dalam eksistensi yang total, tetapi selalu dalam bentuk eksistensi yang tertentu dan terbatas. Ada manusia itu seolah-olah “dicampakkan” ke dalam dunia, dan inilah yang membuat manusia selalu hati-hati dan gelisah akan masa depannya, tentang adanya yang akan datang dan juga tentang kematian. Kegelisahan dan ketidaktenangan eksistensi yang akan datang barulah dapat dikurangi jika manusia menerima kehadiran Tuhan, sebagai dasar segala yang ada atau Yang Maha Ada. Sebagaimana yang disebut oleh Jaspers bahwa dasar eksistensi adalah kepercayaan kepada transedensi.¹⁰

Kesadaran bermasyarakat tidak akan lebih bermakna dalam dirinya sendiri, terkecuali pada transedensi tersebut, maka oleh Jaspers menyebut jaminan eksistensi manusia adalah transedensi. Max Scheler menyebutkan sebagai “yang Ilahi”, sedangkan dalam pancasila yang dapat menjamin eksistensi manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa (sila 1). Ini berarti mencari makna sosialitas manusia sangat tergantung dari keberadaan Tuhan.¹¹

Perlu disadari bahwa manusia makhluk ciptaan yang serba terbatas dan tak terelakkan dan ini harus diakui sebagai suatu hal yang substantif, karena keterbatasan itu sebagai indikasi bahwa manusia akan mati, istilah Heidegger : “Ada” dalam keberadaan -manusia pada hakikatnya adalah Ada menuju kematian (*being-unto-death*).¹² Hal ini suatu keinsafan bagi manusia bahwa nilai kematian adalah sesuatu yang tidak terelakkan, karena itu nilai hidup pribadi dan sosial merupakan alternatif fundamental untuk hidup jujur, berkeadilan dan bermartabat di dalam kehidupan bersama.

C. Kehidupan Sosial Keagamaan

1. Transformasi Sosial Menuju Kesadaran Religius

Gejala antusiasisme agama di kalangan kaum remaja saat ini semakin meningkat yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang semakin menghimpit kehidupan mereka. Begitu pula tentang timbulnya radikalisme agama dan politik disebagian kecil mereka. Dislokasi sosial yang menimpa banyak kaum berusia muda membuat sebahagian diantaranya ingin memastikan kehidupan yang bermakna berdasarkan perspektif eskatologis (keakhiratan) kehidupan yang kekal dan bahagia adalah di akhirat nanti.

⁹ Louis Leahy., *Manusia Sebuah Misteri*, Gramedia, Jakarta, 1989, 274-275

¹⁰ Jaspers, K., *The Origin and Goal of History*, Wesport, Connecticut : Greenwood, 1976, 122

¹¹ Bertens, K., 1983, 183

¹² Bochaski, I., *Contemporary European Philosophy*, California University Press, 1974, 162

Dunia bagi orang beriman adalah penjara, dalam arti harus menanggung kepahitan dengan pasif, sehingga dengan keyakinan iman seperti itu mereka merasa harus menemukan dunia baru yang menentramkan, yaitu dunia yang intensitas ritual yang tinggi. Maka tidak jarang krisis tidak adanya jaminan peran sosial bagi mereka kemudian sering dialihkan ke militansi anak muda yang saleh dan puritan. Simbol-simbol militansi diciptakan untuk identifikasi diri, untuk menarik perhatian masyarakat yang dianggap melupakannya. Bagi mereka agama mungkin aktual dalam konteks kesalahan pribadi, tetapi jelas tidak fungsional dalam ikut menyelesaikan dunia sosial yang sedang rumit ini.

Perubahan ini memang meresahkan, tetapi yang penting bagaimana perubahan sosial itu diangkat menjadi sebuah kesadaran. Memang setiap transformasi sering dimulai dari keresahan yang positif dan akan menjadi basis kesadaran potensial dalam menegakkan tatanan baru yang lebih baik, termasuk di dalamnya tatanan moral dan tatanan sosial keagamaan.¹³

Jika ingin bersikap aktual dalam perubahan kemanusiaan, agama tak bisa hanya berbicara tentang “dunia nanti” yang memang akan dihadapi setiap manusia, tetapi juga mengenai “dunia sekarang” yang sedang dan segera dihadapinya. Untuk itu agama harus mampu menumbuhkan etos dan etik pembangunan harkat kehidupan yang lebih baik. Dalam kaitan ini inti konsep dosa dan pahala, moralitas (*morality*) dan immortalitas (*immortality*) setelah kematian, harus menumbuhkan tanggung jawab sosial pada diri setiap orang. Dari sini dapat diciptakan orde yang stabil dan berbudaya.

Pemahaman tentang bagaimana agama memberikan jawaban dan sumbangan terhadap tatanan sosial masyarakat sangat tergantung pada sistem pendidikan. Sistem belajar yang berorientasi pada pembentukan masyarakat belajar dilingkungan keluarga dan masyarakat (*the religious learning society*) sehingga agama dapat berfungsi sebagai basis penghayatan yang menumbuhkan etos dan etik sosial keagamaan.¹⁴

3. Reaksi Agama Terhadap Perubahan Masyarakat

Pada dasarnya proses perubahan kebudayaan atau perubahan sosial berlangsung kompleks. Akan sangat sulit mengatakan bahwa salah satu aspek seperti agama, memiliki peranan dan respon yang paling berpengaruh dalam perubahan itu. Untuk kepentingan analisis, agama sering sekali disebut sebagai factor “pendorong”, tetapi juga “penahan” terhadap perubahan. Dan kadang-kadang dalam situasi tertentu, agama secara simultan beraksi sebagai pendorong dan penahan sekaligus.

Kendati sebenarnya perubahan kebudayaan itu sendiri netral, namun sering kali dirasa perlu melakukan penelitian terhadapnya. Bentuk-bentuk perubahan itu kadang-kadang dikatakan baik dan kadang-kadang kita nilai jelek penilaian biasanya didasarkan pada konsep-konsep dan norma-norma tertentu yang dianut bersumber dari ajaran agama, mitos atau legenda. Seperti teknologi barat sering kali oleh sementara kalangan dinilai sesuatu yang membahayakan kebudayaan tertentu bersamaan dengan timbulnya teknologi datang pula sejumlah perangkat pandangan hidup yang dianggap mengancam tata nilai kultural asli yang telah mapan.

¹³ Muslem Abdurrahman, *Islam Transformatis*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, 228

¹⁴ Muslem Abdurrahman, 1995, 23i

Pengaruh agama itu sendiri terhadap perubahan sering kali tidak langsung. Bahkan dalam menghadapi perubahan itu, ada sebagian agama yang melakukan transformasi. Suatu gerakan agama tradisional seperti gerakan sufi atau tarekat yang berwajah mistis, sangat mungkin mampu mengadakan transformasi dirinya terhadap realitas dan juga melakukan perubahan masyarakat secara radikal seperti di dalam bidang ekonomi, kesehatan atau kerja-kerja sosial.¹⁵

Pada setiap agama terdapat aspek konservatif yang memberikan rasa kesucian terhadap tradisi dan keberlangsungannya. Karena faktor ini agama sering bersikap menahan diri terhadap unsur perubahan yang mungkin dianggap memprofankan. Sebab lain ialah karena agama sudah diwujudkan dalam simbol-simbol dan idiom suci yang disakralkan yang secara apriori menolak perubahan. Simbol-simbol itulah yang memberikan makna dan kekuatan untuk melawan cara-cara berfikir baru. Karenanya kendati aspek agama yang lain mendorong terhadap perubahan, namun tetap ada elemen tertentu dari agama tersebut yang selalu menjaga kemapanannya.

Secara kesilfahaman yang menjadi tema sentral adalah bagaimana terjadinya hubungan-hubungan antara ide-ide keagamaan dan perilaku atau tabiat bagi para pemeluknya. Kendati sebenarnya kedua level ini tidak selamanya sebangun, namun aspek doktrin agama sedikit atau banyak tetap memiliki kaitan terhadap tindakan-tindakan sosial pemeluknya. Kaitan disini bisa berarti sebangun dan bisa berarti senjang. Oleh karena itu sebagaimana respon agama terhadap unsur baru, juga dilacak dalam pola pemahaman masing-masing pemeluk agama terhadap konsep doktrin yang dianutnya secara formal.

Salah satu ciri perubahan yang lebih kompleks atau yang sering disebut modernisasi ialah rasionalisasi. Di dalam masyarakat Barat, rasionalisasi di bidang ekonomi dan mentalitas sangat tinggi.¹⁶ Dalam masyarakat di mana rasionalitas menduduki tingkat tinggi, fungsionalisasi menjadi keharusan. Persoalan adalah dimana letak makna individu dan hak-haknya. Dalam suasana seperti itu biasanya terjadi konflik antara kepentingan bersama (*Cooperate values control*) dan kepentingan individu (*personal autonomy*). Karenanya dalam suasana demikian kerinduan terhadap makna individu dan emosi keagamaan menjadi sangat didambakan dan fenomena semacam ini membuat orang menolak kembali ke agama atau apa yang disebut proses elienasi, yaitu ketenteraman dan kepuasan rohani atau spiritual melalui agama yang pada gilirannya akan membentuk perilaku khas terhadap persoalan sosial keagamaan.

4. Dialog: Solusi Konstruktif Menghindari konflik Sosial Keagamaan

Salah satu upaya yang terus dilakukan dan dikembangkan di dalam kehidupan sosial keagamaan adalah adanya dialog antar umat beragama, sebab keberagamaan sistem dan pola perilaku sosial kalau tanpa formulasi mudah terjadi benturan-benturan yang mengakibatkan saling curiga-mencurigai antara umat beragama. Di dalam metode pemahaman filsafat disebut dengan dialektika. Karl Marx menjelaskan dengan sistem dialektika sejarah dapat diciptakan masyarakat

¹⁵ Muslem Abdurrahman, 1995, 18

¹⁶ Weber, M., *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York, Scribner, 1976, hal 50.

sosialis-komunis. Kant dengan metode dialektikanya manusia sampai kepada pemahaman yang mutlak sebagai pembenaran yang rasional dan sejati.¹⁷

Pluralisme tidak semata menunjukkan pada realitas tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap realitas kemajemukan tersebut. Seseorang baru dapat dikatakan dapat menyandang gelar pluralis, apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan itu. Dengan kata lain pengertian pluralisme agama ialah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, melainkan terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan beragama.¹⁸

Adanya macam-macam agama dan iman kepercayaan di dunia adalah suatu realitas empiris yang sulit dibantahkan. Berkenaan dengan kenyataan tersebut, setiap orang dan umat beragama disapa untuk mengambil sikap, sebab dewasa ini semakin jelas arus pemahaman dan sikap yang menegaskan bahwa agama mempunyai makna dalam kehidupan beragama, sehingga pendekatan yang diambil pun bukan pendekatan apriori konseptual atau komperatif-evolutif. Akan tetapi pendekatan yang diambil adalah pendekatan dialog teologis. Pendekatan ini mengakui pluralisme sebagai suatu yang penting bahkan mulia.¹⁹

Dialog dan bukan sikap menandingi sudah barang tentu akan menghasilkan konsep-konsep pemikiran yang kreatif dan produktif terhadap sosial.²⁰ Sebaliknya sikap menandingi dalam persaingan yang tidak sehat, malah akan menghasilkan ketegangan-ketegangan akibat dari klaim kebenaran masing-masing agama yang bersifat subjektif. Dengan adanya dialog, apalagi yang didukung oleh keterbukaan dan kejujuran maka hasilnya adalah toleransi, keharmonisan dalam kehidupan sosial keagamaan. Maka dialog perlu terus ditransformasikan dalam wacana yang lebih universal agar terhindar dari komplik sosial.

5. Pendekatan Visi Keagamaan

Seiring derasnya desakan modernisasi telah membuat kebahagiaan manusia tersingkir dalam pencaturan kehidupan sosial. Kelompok sosial ini sering disebut sebagai orang-orang yang tersisih dari perubahan sosial, karena tidak memiliki kekuatan sosial, ekonomi dan politik untuk memproteksi tuntutan modernisasi tersebut. Mereka biasanya juga disebut kaum dhu'afa, yakni renta ekonomi, renta politik, dan lemah harkat kemanusiaan.²¹

Kelompok sosial ini ada dimana-mana, keberadaan mereka lebih banyak di kota-kota besar, hal ini bukan karena mereka malas, tetapi karena terdesak dan tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan hidup.

Suatu fakta mendominasi setiap pemilihan umum, masalah kemiskinan menghantui dunia. Ratusan orang hidup dalam keadaan putus asa, tertinggal dari martabat derajat kemanusiaannya. Masalah yang tetap menjadi beban pemikiran adalah bagaimana melepaskan daya kekuatan mereka yang tersembunyi berupa

¹⁷ Kattasof, L. O., *Element of Philosophy (Terjemahan Soeyono Soemargono)*, Tirta Wacana, Yogyakarta, 1992, 415.z

¹⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1999, hal 40.

¹⁹ Alwi Shihab, 1999, 13

²⁰ Coward, H. *Pluralisme, Tantangan bagi Agama-agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, 167.

²¹ Muslem Abdurrahman, 1995, 37

potensi dinamis yang berkembang oleh karena itu pendekatan dan upaya konstruktif yang bernilai visi keagamaan mendesak diperlukan.

Bila dilihat dari visi kemanusiaan keterpurukan sebagian masyarakat dari kehidupan sosial modern lebih diakibatkan oleh kesalahan struktur yang diterapkan. Penerapan struktur terlalu eksploitatif, tiranik dan cenderung otoritatif. Subjek modernisasi adalah elit dan objeknya adalah mereka yang awam, lemah dan bodoh.

Pendekatan birokratik terhadap kaum miskin harus diganti oleh usaha-usaha yang menghidupkan motivasi dari dalam, karena itu aspirasi kaum miskin dalam bidang material, sosial dan spiritual sebelumnya mutlak diperlukan untuk dijabarkan.²²

Sejalan dengan permasalahan yang ada, corak atau visi keagamaan yang perlu ditekankan kepada mereka adalah bahwa agama tidak hanya bersemangat membangun kerajaan di akhirat, sehingga agama menjadi pelarian semu. Tetapi harus juga memberi motivasi pembebasan (*emansipatoris*), agama bukan hanya menekankan penyelamatan individu (*individu salvation*), tetapi agama dapat membawa penyelamatan sosial (*social salvation*). Karena itu agama bagi mereka ditanamkan untuk mampu mengintegrasikan nilai etnik antar kesalehan individu dan ketaqwaan sosial.

Dengan pendekatan seperti ini, maka taqwa mempunyai basis sosial yang luas dan menjadi dasar solidaritas sosial yang bersifat trasedental antara kaum beriman di dunia dan mereka memiliki persepsi tentang dunia berdasarkan prespektif agama.²³

D. Refleksi Filsafat

Menanggapi persoalan-persoalan sosial keagamaan seperti tersebut pada bab II di atas, maka diperlukan suatu perenungan kembali secara filosofis untuk memahami masalah-masalah fundamental yang secara hakiki menjadi komponen atau tiang penyangga bagi eksistensi kehidupan social keagamaan. Komponen yang dimaksud adalah :

1. Ontologi, yaitu dasar keyakinan untuk menentukan batasan “ ada” (Sein, Being, *tzijn*), dan sejauh mana “ada” itu” yang ada” (*tzijnde als zijnde*). Implikasi dari padanya adalah lahirnya aliran idealism, spritualisme, pluralism dengan cara pandang tertentu terhadap hakikat realitas sosial religious masyarakat.
2. Epistimologi, yaitu jalan atau cara yang dipilih untuk menuju tercapainya kebenaran dari kenyataan, agar kesolidan dan keabsahan kebenaran realitas sosial religious terungkap secara objektif.
3. Aksiologi, yaitu dasar dan ukuran untuk menentukan hakikat kebenaran atau kenyataan itu, dan nilai-nilai yang memberi keabsahan untuk menerapkan kebenaran atau realitas social religious itu secara praktis dalam kehidupan konkrit.²⁴

Setiap masyarakat manusia adalah suatu usaha kontruktif. Agama menempati suatu tempat dalam usaha ini. Tujuan utama kita di sini adalah

²² Sudjatmoko, *Pembangunan sebagai Proses Belajar*, dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 2000, Sebuah Bunga Rampai, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987, hal 10.

²³ Muslem Abdurrahman, *Islam Transformatif*, 235

²⁴ Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, 5-9.

membuat beberapa pernyataan umum sebelum hal ini bisa dilakukan secara nalar, harus dijelaskan terlebih dulu pernyataan di atas mengenai kemampuan masyarakat dalam pembangunan dunianya. Yang penting dalam penjelasan ini memahami masyarakat dalam kerangka-kerangka dialektik.

Masyarakat adalah suatu fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia. Realitas sosial tak terpisah dari manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu produk masyarakat. Setiap biografi individu adalah suatu episode di dalam sejarah masyarakat yang sudah ada sebelumnya serta akan terus berlanjut sesudahnya. Lebih dari itu, di dalam masyarakatlah dan sebagai hasil dari proses sosial, individu menjadi sebuah pribadi, ia memperoleh dan berpegang pada suatu identitas, dan ia melaksanakan berbagai proyek yang menjadi bagian kehidupannya. Manusia tidak bisa eksis terpisah dari masyarakat. Kedua pernyataan itu, bahwa masyarakat adalah produk manusia dan manusia produk masyarakat tidaklah berlawanan. Sebaliknya keduanya menggambarkan sifat dialektik inheren dari fenomena masyarakat. Hanya jika sifat ini diterima, maka masyarakat akan bisa dipahami dalam kerangka-kerangka yang memadai realitas empirisnya.²⁵

Proses dialektik fundamental dari masyarakat terdiri dari tiga momentum atau langkah yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Pemahaman secara seksama terhadap tiga momentum ini akan diperoleh suatu pandangan atas masyarakat yang menjadi secara empiris. Eksternalisasi adalah suatu pencerahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya. Obyektivasi adalah dipandanginya produk-produk aktivitas itu (baik fisis maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsernya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (faktifitas) yang eksternal terhadap para produsen itu sendiri. Internalisasi adalah peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui obyektivitas, maka masyarakat menjadi suatu realitas satu generasi, unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat.²⁶

E. Kesimpulan

Suatu realitas yang tak terelakkan bahwa masyarakat itu berkembang secara dinamis sesuai dengan kebutuhannya, untuk menutupi kebutuhan tersebut melahirkan karya yang berupa teknologi sebagai alat untuk efisiensi kerja dan peningkatan volume produksi ekonomi sehingga manusia secara teknologi hidup dalam kenyamanan dan terlindung. Akan tetapi dibalik itu, teknologi bisa menimbulkan kutukan dan malapetaka bagi kehidupan manusia yang berimplikasi pada kehidupan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian antar agama dan suku, serta kesenjangan sosial lainnya yang disebabkan oleh terhimpitnya kehidupan mereka dari kungkungan penguasa dan ketidak-adilan.

²⁵ Berger, L.P. *The Sacred Canopy* (terjemahan Hartono), Pustaka, Jakarta, 1994, hal 4.

²⁶ Berger, L.P., *the Sacred...*, hal 5.

Problem-problem sosial tersebut diperlukan usaha-usaha strategis dari agama, karena agama mampu mencerminkan perilaku baik di dalam kehidupan masyarakat secara harmonis, sebab agama berperan sebagai interpretatif yang memberikan makna terhadap realitas dan kerangka acuan normatif. Agama pada satu sisi secara konservatif cenderung mempertahankan kemampuan, dan di sisi lain dapat memberikan pengesahan terhadap realitas tertentu, tetapi agama juga berfungsi sebagai kritik terhadap tatanan yang menyimpang.

Filsafat sebagai ilmu berfikir kritis dapat mengajukan alternatif terhadap sosial keagamaan baik pada metode-metode versi tokoh, seperti dialektika (Karl Max), analisa bahasa (Wittgenstein), Falsifikasi (Popper), maupun metode umum faktual dengan penekanan filosofis dan pertanyaan-pertanyaan pilihan filosofis pula, sehingga persoalan sosial keagamaan dapat dilihat secara benar dan substansial.

Solusi alternatif yang dapat ditawarkan adalah masing-masing tokoh agama perlu membangun sikap kebersamaan untuk membangun kehidupan masyarakat yang damai, membangun sistem dialogis yang kontinyu, menghilangkan egoisme masing-masing agama serta membangun visi yang menguntungkan semua pihak dengan tidak merendahkan pihak lain secara seimbang dan proporsional dengan harapan yang damai dan berbudaya dengan visi keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alek Lanur, *Dimensi Sosial Dalam (Manusia dalam (Manusia dalam Pijar-pijar kekayaan Dimensinya)*. (educational) Mudji Sutrisno, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, Mizan, Bandung, 1999
- Beck, R.N., *Perspektivesin Social Philosophy*, New York, Renhart and Winston Inc. 1967
- Berger, L.P. *The Sacred Canopy (terjemahan Hartono)*, Pustaka, Jakarta, 1994
- Bertens K., *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I. Gramedia, Jakarta, 1983
- Bochaski, I., *Contemporary European Philosophy*, California University Press, 1974
- Coward, H. *Pluralisme, Tantangan bagi Agama-agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1992
- Driyakara, N., *Percikan Filsafat*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1981
- Jaspers, K., *The Origin and Goal of History*, Westport, Connecticut : Greenwood, 1976

Kattasof, L. O., *Element of Philosophy (Terjemahan Soeyono Soemargono)*, Tirta Wacana, Yogyakarta, 1992

Koentowibisono., *Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Suatu Pemahaman Secara Filsafat, Jurnal Filsafat seri 12 November, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1990

Louis Leahy., *Manusia Sebuah Misteri*, Gramedia, Jakarta, 1989

Magnus – Suseno, F., *Berfilsafat dari Konteks*, Gramedia, Jakarta, 1992

Muslem Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995

Sudjatmoko, *Pembangunan sebagai Proses Belajar*, dalam Masalah Sosial Budaya Tahun 2000, Sebuah Bunga Rampai, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1987

Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995

Weber, M., *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, New York, Seribner, 1976